

## SUBSTANSI BUDAYA DALAM KEBIJAKAN TATA RUANG DI BALI

*Gusti Ayu Made Suartika\**

### ABSTRACT

This article analyses essential elements of Balinese culture, which are formulative of land use planning for Bali. Using ethnographic and hermeneutic methodologies and a cultural matrix derived from E. T. Hall (1973), strategic territorialities are defined and correlated to nine dimensions of culture. The study is contextualised by the ongoing debate over the challenges Bali faces in conserving its cultural heritage while achieving its development objectives. The results emerge from Fundamental Research Scheme funded by the Indonesian Department for Education.

**Key Words:** cultural forms and practices, spatial planning, development

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisa elemen-elemen budaya yang menentukan dalam perencanaan tata guna lahan di Bali. Dengan menerapkan pendekatan hermenutik, etnografi, dan Matrix Kebudayaan yang diderivasi oleh E.T. Hall (1973), keruangan-keruangan strategis didefinisikan serta dikorelasikan dengan sembilan dimensi kebudayaan lainnya. Studi ini dikontekstualisasi oleh terjadinya debat yang berkelanjutan terkait tantangan-tantangan yang dihadapi Bali dalam mengkonservasi peninggalan-peninggalan kebudayaan, serta pada saat yang sama, mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Artikel ini menyajikan hasil studi yang diperoleh melalui Penelitian Skim Fundamental yang didanai oleh Departemen Pendidikan Indonesia.

**Kata Kunci:** wujud dan praktek budaya, perencanaan keruangan, pembangunan

### PENGANTAR

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencanangkan bahwa wujud pembangunan di Bali berada dalam kerangka pengembangan berwawasan budaya. Keputusan ini dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Bali yang dimulai di akhir tahun 1960-an. Konsepsi ini telah dijadikan fondasi yang melandasi beragam aktivitas

pembangunan, mulai dari penyusunan beragam produk regulasi, implementasi kebijakan, pengendalian, serta evaluasi dari aktivitas-aktivitas pembangunan.

Pencanangan format pembangunan berbudaya untuk Bali dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, potensi keunikan kultur yang dimiliki Bali yang pada akhirnya menjadi alasan utama terpilihnya pulau ini sebagai sentra pem-

\* Staf Pengajar Program Studi Arsitektur, Universitas Udayana

bangunan kepariwisataan di Indonesia oleh presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Potensi ini dibarengi oleh alasan ke alasan berikutnya, yakni praktik dan wujud budaya Bali (ke-Bali-an) secara langsung menjadi acuan tingkah laku kehidupan sehari-hari "orang Bali". "Orang Bali" ini terikat akan kaidah/tata nilai, norma, serta kode-kode tradisi yang dijadikan sebagai acuan "pengatur" pola-pola interaksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sirkumstansi ini menjadikan budaya tidak hanya berurat akar dari satuan masyarakat pendukungnya, tetapi keberlangsungannya secara kontinyu dilestarikan dalam basis keseharian.

Kebijakan tata ruang yang diimplementasikan di Bali tidak dapat dipisahkan dari nuansa budaya yang menjadi nafas pembangunannya. Beragam tata aturan spasial yang ada, eksistensinya mengakomodasi tata nilai tradisi yang ada. Misalnya, pengaturan sempadan bangunan secara teknis tidak hanya terkait pertimbangan keamanan, kelancaran sirkulasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, atau kenyamanan dalam lingkungan terbangun, tetapi juga mempertimbangkan tata aturan adat lokal. Pembangunan bangunan yang berfungsi mewadahi aktivitas manusia (*pawongan*) hanya diizinkan untuk dibangun di sebelah wadah berfungsi ritual (*prhyangan*) jika memenuhi sempadan *apeneleng* atau *apenimpugan batu*. *Apeneleng* adalah satuan jarak yang diukur dari titik seseorang berdiri ke titik pandangan dari orang bersangkutan menghilang, sedangkan *apenimpug* adalah jarak yang diukur dari titik seseorang berada dan melempar batu sejauh-jauhnya, ke titik yang dicapai oleh batu yang dilemparkan oleh orang bersangkutan.

Contoh pengaturan spasial berbasis budaya adalah Peraturan Daerah Bali No 2, 3, 4 Tahun 1974 yang mengatur ketinggian bangunan yang tidak melebihi ketinggian pohon kelapa – atau jika dimetrikkan ketinggian ini telah diekuivalenkan menjadi 15 meter. Produk regulasi ini memiliki kekhususan karakter tersendiri, bahkan telah menjadi ikon yang memperkaya koleksi keunikan yang melekat pada pulau Dewata, salah satu pulau kecil penyusun gugusan kepulauan Nusa

Tenggara Barat, Indonesia. Dalam perkembangan kemudian, Pemerintah Daerah Bali melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, memberi peluang pemberian izin – pada kondisi-kondisi khusus – bagi pengadaan bangunan/struktur dengan ketinggian yang melebihi 15 m. Namun, Perda ini tidak memberi kejelasan akan kondisi-kondisi khusus yang dimaksud di sini.

Implementasi pengaturan spasial di atas bersifat mengikat dan bersanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks pemanfaatan lahan di Bali, konformasinya sangat kental dikendalikan oleh kesadaran masyarakat untuk memproteksi elemen-elemen budaya yang eksistensinya rentan akan pengrusakan. Ini, khususnya, melingkup faktor-faktor eksternalitas yang diakibatkan oleh beragam aktivitas pembangunan yang terjadi di sekitarnya (Suartika 2005).

Akan tetapi, pascaempat puluh tahun pembangunannya, Bali menghadapi dilema yang serius, berkenaan dengan konsistensi antara pemanfaatan sumber daya spasial dengan ide pelaksanaan praktik-praktik pembangunan yang mengusung ide konservasi budaya. Berikut beberapa contoh keadaan yang merefleksikan kompleksitas dilema yang dimaksud. Telah terjadinya konversi lahan yang berperan strategis dalam melestarikan interaksi budaya dalam kecepatan yang semakin tidak terkontrol. Para petani (karena kesukarelaan mereka atau keterpaksaan karena himpitan dari beragam kondisi) kehilangan ribuan hektare lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk memenuhi kepentingan lahan yang diakibatkan sektor pembangunan lainnya (Suartika 2010).

Lebih lanjut, para pemerhati lingkungan menunjukkan kekhawatiran mereka dengan terjadinya penurunan yang signifikan dari skala hutan di Bali barat, hutan di daerah perairan Danau Batur (Kintamani), dan hutan bakau di Suwung (Denpasar). Kemudian, telah terjadinya pembangunan hotel dan fungsi-fungsi komersial lainnya yang direalisasikan dengan melalaikan sempadan bangunan yang diizinkan untuk struktur berfungsi *pawongan* dan ritual. Masih terkait dengan konflik kepentingan antara kedua

fungsi ini. Telah sering terjadi keputusan untuk memindahkan tempat suci dalam rangka memberi jalan bagi pembangunan fasilitas serta amenitis kepariwisataan. Kondisi ini telah menjadi polemik berkepanjangan yang menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang mengalah dan termarginalisasi.

Tidak dapat dipungkiri jika praktik-praktik pembangunan tersebut di atas terjadi karena pertama, adanya peningkatan kuantitas aktivitas pembangunan dari berbagai sektor kepentingan yang semuanya memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan ruang-ruang (lahan) yang ada. Kedua, kebutuhan ini tidak bersifat stagnan, atau diam di tempat, tetapi beranjak pada grafik yang meningkat dari waktu ke waktu. Ketiga, keragaman kepentingan ini tidak hanya berkompetisi dalam penguasaan akses terhadap lahan, tetapi masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda antar satu dengan yang lain, dan pada banyak kesempatan tidak berjalan beriringan. Kondisi terakhir ini telah menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi, dalam hal ini, telah terjadi peningkatan varian dari kelompok kepentingan pengguna lahan, skala lahan yang dibutuhkan mengalami peningkatan, dan munculnya konflik-konflik keruangan. Ketiga kondisi ini telah secara sukses meningkatkan kompleksitas sirkunstansi tata keruangan di Bali.

Dalam kenyataan secara umum di lapangan, lahan-lahan yang rentan eliminasi adalah lahan-lahan strategis yang memiliki fungsi menyangga tatanan lingkungan dan pola-pola interaksi budaya (Suartika, 2005). Ini konsisten dengan kajian teoretis yang dilaksanakan oleh Keiser, Godschalk, dan Chapin (1995) yang menekankan bahwa tren dalam tata guna lahan menunjukkan kecenderungan bagi sektor kepentingan sosial kemasyarakatan (dalam kategori ini melingkupi ruang-ruang penyangga budaya) dan proteksi lingkungan, yang terkesampingkan oleh kebutuhan lahan untuk aktivitas ekonomi. Lahan untuk kedua kepentingan ini cenderung terkonversi dan kemudian tereliminasi untuk mawadahi kebutuhan lahan yang dimunculkan sektor lainnya.

Konversi dan eliminasi ruang-ruang untuk lingkungan dan mawadahi kepentingan sosial

yang berurat akar di masyarakat akan dan telah berpengaruh pada sustainabilitas dari beragam interaksi budaya di Bali. Terputusnya jaringan irigasi air untuk pertanian (subak/sistem irigasi di Bali), semakin sempitnya area pantai yang dapat dimanfaatkan untuk upacara *melasti* (upacara ritual untuk pembersihan yang dilaksanakan di pantai), eliminasi ruang terbuka hijau, praktik-praktik pembangunan fasilitas yang melanggar sempadan dan batas ketinggian bangunan, dan lain-lain telah menginterupsi dan menciumkan ruang-ruang yang tersedia untuk mawadahi praktik-praktik budaya lokal. Frekuensi praktik-praktik pembangunan yang semacam, dari waktu ke waktu menunjukkan frekuensi yang meningkat.

Jadi, dalam konteks ini, konsepsi dasar pembangunan Bali yang berbudaya menghadapi tantangan signifikan. Jika tidak ditangani, tantangan ketataruangan ini akan sangat memungkinkan menggoyahkan fondasi pembangunan yang dicanangkan lebih dari empat abad yang lalu. Dalam kerangka konteks diskusi ini, artikel ini bertujuan menganalisis ruang-ruang berfungsi budaya di Pulau Dewata. Analisis ini akan menghasilkan beragam wujud teritorial yang eksistensinya harus dijaga keberlangsungannya jika tatanan budaya Bali akan tetap dilestarikan dalam pembangunannya ke depan.

Artikel ini didasari sebuah studi tentang budaya keruangan yang menerapkan metodologi penelitian etnografi dan hermeneutik. Tulisan ini mengulas bentuk dan praktik-praktik budaya keruangan di Bali dengan mengimplementasikan matriks kebudayaan yang ditawarkan oleh seorang antropologis bernama E. T. Hall (1973).

## TRADISI DAN KEBUDAYAAN DI BALI

Dalam periode kolonialisasi di Indonesia, Belanda menemukan bahwa kebudayaan Bali sangatlah kaya dan memiliki daya pikat yang sangat memukau bangsa kulit putih dari Negeri Kincir Angin ini. Selain bertugas memonopoli perdagangan serta sistem produksi di Kepulauan Sunda Kecil dengan Bali sebagai salah satu pulau yang termasuk di dalamnya, Belanda sangat protektif terhadap keberadaan dan keberlangsungan wujud budaya yang mereka kagumi.

Belanda berusaha mencegah kebudayaan ini dari kepunahan. Dengan penuh kesadaran, staf kolonial Belanda bertugas di Bali saat itu membendung arus masuknya ajaran Nasrani dan Islam yang dipandang sebagai ancaman yang berpotensi mengikis kebudayaan Bali pada level yang membahayakan keutuhannya secara keseluruhan.

Kekuatan budaya Bali bersandar pada sistem adat yang dipraktikkan secara luas dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini berurat akar di masyarakat yang mengimplementasikan dan menaati sistem ini. Dilandasi kehidupan yang sangat dekat dengan lingkungan alamiah dan praktik-praktik ritual yang kompleks terkait Hinduisme-Bali, krama adat-anggota masyarakat yang menjunjung sistem adat-percaya akan konsep keseimbangan dan keharmonisan kosmos. Keseimbangan dipercaya sebagai sumber kebahagiaan yang direfleksikan dalam keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya; manusia dengan manusia; dan manusia dengan lingkungan alamiah sekitarnya. Konsep yang menempatkan manusia pada posisi sentral dikenal dengan Tri Hita Kharana.

Harmonisasi ini tidak hanya terjadi dalam alam kasat mata, tetapi melingkup harmonisasi dengan komponen-komponen dari ketiga elemen di atas yang dipercaya keberadaannya, tetapi insifibel dari penglihatan atau perabaan. Dalam praktiknya, konsep Tri Hita Kharana ini memiliki fleksibilitas yang dituangkan dalam konsep tempat – desa –; waktu – kala –; dan situasi – patra. Hubungan yang dianggap harmonis bersifat spesifik disesuaikan dengan di mana, kapan, dan dalam konteks yang bagaimana hubungan ini didefinisikan dan dipraktikkan oleh kelompok krama adat dari desa adat tertentu.

Sementara itu, pada saat yang sama, kebaikan dan keburukan dipercaya juga sebagai sumber keseimbangan. Seluruh komponen budaya telah diwujudkan sebagai perpaduan antara baik dan buruk; timur-barat; utara-selatan; baik-buruk; terang-gelap; perempuan-lelaki; kelahiran-kematian. Keburukan tidak dapat dihancurkan dengan tujuan untuk memelihara yang baik saja. Salah satunya tidak dapat berdiri

tanpa yang lain. Pengakuan terhadap suatu kondisi tidak akan mungkin tanpa pengakuan terhadap kondisi kebalikannya. Inilah yang dikenal dengan konsep Rwa Bhinedha dalam tradisi dan kebudayaan di Bali.

Lebih lanjut, tradisi dan adat di Bali merupakan wujud kebudayaan yang dilandasi oleh konsep hierarki yang kokoh, yang dimanifestasikan dalam beragam bentuk. Konsep Tri Angga membagi sesuatu dalam tiga bagian secara vertikal: kepala (utama, sakral); badan (madya); dan kaki (nista, kurang sakral). Pembagian ini juga dimanifestasikan dalam bahasa Bali, yang juga memiliki tiga tingkatan, utama, madya dan nista. Beragam upacara ritual juga dibagi dalam tiga tingkatan yang disesuaikan dengan kemampuan kondisi yang dihadapi masing-masing kelompok masyarakat pelaku. Sementara ruang bukan perkecualian. Keseluruhan pulau: pura, desa, rumah dibagi dalam tiga zona sesuai dengan konsep Tri Angga.

#### ANALISIS BUDAYA KERUANGAN DI BALI DARI SISI ANTROPOLOGI

Di atas telah dikemukakan konsep-konsep dasar yang melandasi wujud dan praktik kebudayaan di Bali. Selanjutnya, akan didemonstrasikan bagaimana konsep-konsep tersebut terwujud dalam tata nilai dan bentuk/praktik budaya. Berbicara mengenai kebudayaan berarti bergelut pada disiplin keilmuan yang sangat luas jangkauannya. Kemungkinan untuk kehilangan arah sangatlah potensial. Akan dibutuhkan sebuah metode yang menawarkan cara mengklasifikasikan elemen-elemen budaya sehingga kebudayaan dapat dirumuskan dan diidentifikasi komponennya. Kepentingan ini bersifat krusial, khususnya untuk tujuan studi penentuan kebijakan ketata-ruangan di Bali, yang secara ideal diharapkan dilandasi oleh ide menjaga keberlangsungan tatanan budaya lokal.

Untuk tujuan ini, dan dengan dilandasi pendekatan metodologi etnografi dan hermeneutik, penulis menyodorkan sebuah metode analisis yang ditawarkan seorang antropologis kenamaan, E.T. Hall (1973), yang dikenal dengan *Matrix of Culture*. Keunggulan dari *Matrix* ini adalah

kemampuannya untuk menunjukkan komponen penyusun kebudayaan secara kronologis walau tetap mengakui bahwa *overlap* antara satu elemen dengan yang lainnya masih harus dipertimbangkan. Pemikiran Hall bukan bertujuan mensimplifikasi budaya itu sendiri, tetapi mengafirmasi bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks.

Hall berpendapat bahwa kebudayaan adalah wujud dari proses manusia bermediasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kebudayaan merupakan mekanisme komunikasi antara manusia dan lingkungannya.

Kebudayaan memiliki 10 elemen pembentuk, yang masing-masing memiliki wujud nilai/praktik dan wujud bentuk. Masing-masing elemen ini diberi nama *primary message system* (PMS). Detail interaksi antara satu PMS dengan PMS lainnya dari satu komunitas budaya dengan komunitas budaya yang lainnya akan bervariasi, – kemasyarakatan yang mana, serta pada lingkungan yang bagaimana kebudayaan ini muncul dan berkembang. Diagram 1 mendemonstrasikan secara singkat esensi budaya Bali dan proses penjabarannya dengan menerapkan 10 PMS dari Hall.

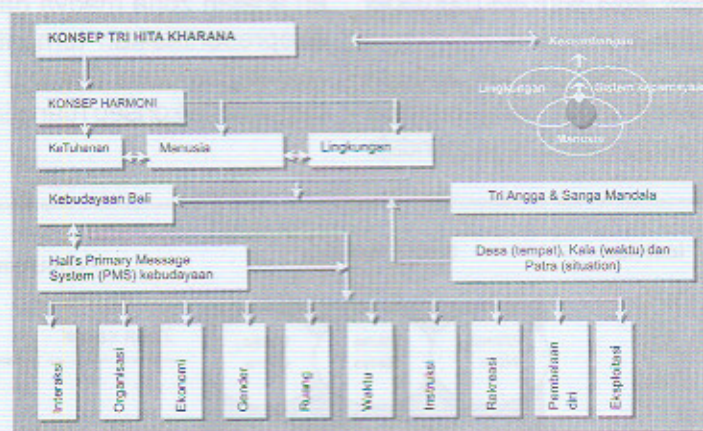


Diagram 1 Kebudayaan Bali dan Hall Klasifikasi untuk Kebudayaan

Sumber: diadaptasikan dari (Suartika 2010)

Berikut akan didiskusikan kebudayaan Bali dengan format yang disesuaikan dengan 10 elemen budaya/*primasy message system* (PMS) dari Hall. Tujuan utama yang akan dicapai dari proses ini adalah mengidentifikasi wujud budaya keruangan di Bali yang akan menjadi langkah awal dalam penentuan ruang-ruang berfungsi budaya. Pengetahuan akan eksistensi ruang-ruang ini akan memiliki peran strategis jika advokasi pelestarian kebudayaan akan ditindaklanjuti dalam pengaturan tata ruang di Bali. Pengetahuan ini akan menggambarkan karakter spasial sebuah area yang selanjutnya akan menjadi tolak ukur dalam penentuan kebijakan dalam pemanfaatan lahan, penzoningan, maupun penentuan *design guidelines* (acuan desain kawasan maupun bangunan) untuk daerah dengan potensi tertentu atau khusus.

## PRAKTIK DAN WUJUD BUDAYA

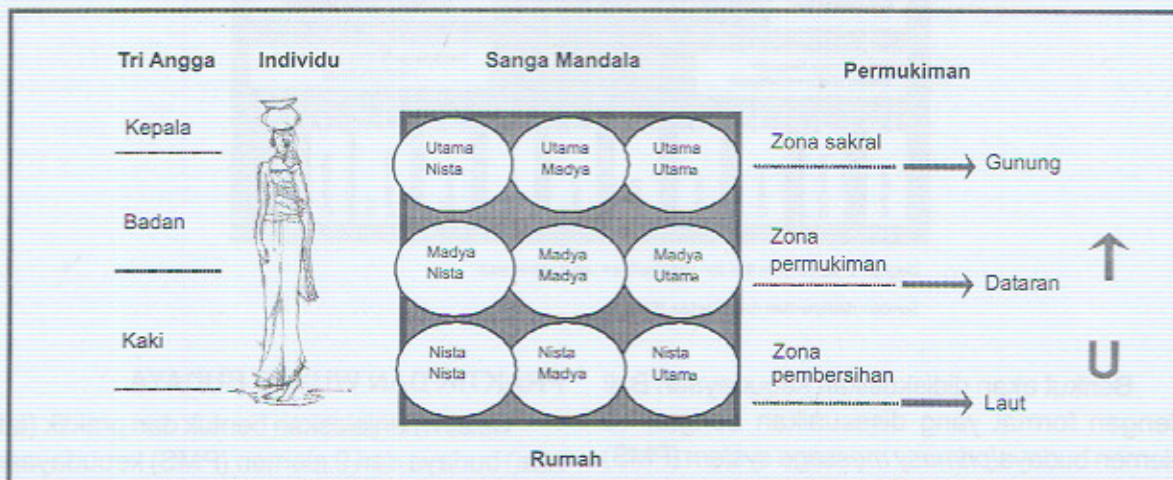
Selain menjelaskan bentuk dan praktik (*tata nilai*) budaya dari 9 elemen (PMS) kebudayaan, sebagai penekanan, analisis dalam bagian ini akan ditekankan pada bentuk dan praktik budaya keruangan dan keterkaitannya dengan 9 elemen budaya lainnya. Strategi ini dikaitkan dengan fokus diskusi yang berbicara tentang tata ruang yang tidak hanya bersifat fisik tetapi pada akhirnya akan berkorelasi dengan arti budaya yang dimiliki oleh area pewardahan sebuah fungsi direncanakan untuk ditempatkan/dialokasikan. Pada akhir pembahasan akan dilengkapi dengan konklusi tentang ruang-ruang kritical berfungsi budaya yang secara ideal menjadi pertimbangan, sebelum PBKB difinalisasi keberadaannya.

(a) *Keruangan*, yang dimaksudkan dengan elemen teritorial dalam hal ini adalah proses

komunikasi (= proses yang memunculkan budaya) yang terjadi karena adanya usaha, berkaitan dengan kepemilikan, tata guna, perlindungan, maupun pembelaan terhadap sebuah area/teritori. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia selalu diwarnai oleh usaha kelompok tertentu yang merasa terancam untuk membela teritorinya, sementara di pihak lain, pihak yang merasa memiliki superioritas akan melakukan perampasan teritori yang bukan menjadi hak miliknya. Kolonisasi yang terjadi sebelum Perang Dunia II merupakan contoh nyata dari praktik semacam dalam rangka penguasaan lahan yang kaya sumber daya alam atau berbagai sumber pendukung proses produksi.

Perwujudan praktik dan bentuk budaya spasial dalam kebudayaan di Bali mengacu pada penerapan konsep Tri Angga dan Sanga mandala

diorientasikan dari utara ke selatan (orientasi kosmik) dan timur barat (orientasi alamiah). Dalam skala rumah tangga, pekarangan sebuah rumah tradisional, zona yang dianggap paling sakral (utama=kepala) adalah lokasi pura rumah tangga (sanggah/merajan) berada. Area di tempat anggota keluarga tinggal diklasifikasikan sebagai zona madya (badan), dan area tempat pembersihan diklasifikasikan sebagai zona nista (kaki). Pada skala yang lebih besar, dalam level Bali sebagai sebuah pulau secara keseluruhan, zona utama adalah tempat gunung (arah utara, area tertinggi) berada, sedangkan area pemukiman adalah zona madya dan area pembersihan direpresentasikan tempat air atau laut (arah selatan) berlokasi. Gambar 1 mempresentasikan bagaimana konsep ruang ini diaplikasikan.



Gambar 1 Keruangan dalam Kebudayaan Bali

Secara umum, arah timur laut memiliki nilai religius yang signifikan dalam kaitannya dengan orientasi kosmik dan alamiah. Dalam praktik, zona ini sangat disakralkan dan merupakan zona tempat struktur-struktur berfungsi ritual ditempatkan. Seperti telah ditekankan sebelumnya bahwa kombinasi antara konsep hierarki Tri Angga, konsep keseimbangan Tri Hita Kharana dan konsep perbedaan Rwa Bhineda, mengarahkan absennya demarkasi absolut antara zona satu dengan yang lain. Lebih lanjut, setiap zona juga dibagi dalam tiga tingkatan mikro zona yang

sejenis. Misal di zona utama akan terdapat pula sub-zona yang tersakral, madya, dan nista, seperti pula halnya dengan zona-zona lainnya. Contoh dalam kawasan pura yang diklasifikasikan sebagai zona utama, pada saat yang sama memiliki zona utama (di tempat aktivitas pemujaan tertinggi dilaksanakan), madya (di tempat aktivitas pendukung pemujaan utama dilaksanakan), dan nista (di tempat masyarakat berkumpul sebelum mempersiapkan diri untuk memasuki area madya ataupun utama). Penzoningan ini biasanya juga didemonstarsikan melalui perbedaan level ke-

tinggian dengan zona utama berada di ketinggian tertinggi, diikuti zona madya dan nista. Di laut yang secara umum diplot sebagai zona nista, pada saat yang sama juga merupakan area sakral. Laut merupakan tempat aktivitas peleburan, pembersihan dilaksanakan, termasuk pembersihan simbol dan perwujudan dari dewa-dewi yang dipuja dan disucikan.

Bergerak dari teritori dalam pengertian lahan secara tradisional di Bali, lahan dikonotasikan sebagai ibu pertiwi, warisan leluhur yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengaturannya berada di tangan lembaga adat/institusi desa adat. Pada zaman sebelum hak pribadi atas tanah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang Agraria dan Pertanahan 1960, setiap krama adat (1 keluarga) diberikan sebidang tanah – tanah karang desa – untuk membangun rumah dan pekarangan keluarga. Kelompok krama adat yang berada pada lokasi tertentu dengan luasan tertentu pula akan membentuk satu banjar adat. Sebaliknya, sebagai anggota banjar dan desa adat, krama adat disyaratkan untuk memenuhi kewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas adat dalam bentuk kontribusi tenaga – ayahan – dan materi – patus/pesu-pesuan. Aktivitas adat ini meliputi kegiatan ritual bersama, interaksi antar-krama adat, dan keharmonisan hidup dengan alam. Dengan diberlakukannya UU Agraria dan Pertanahan 1960, hak adat untuk memakai lahan adat harus ditinggalkan, kecuali di beberapa desa Bali asli – Bali Aga –, dengan hak semacam tetap dipegang teguh. Desa Bali Aga ini termasuk desa Tenganan, desa Bayung Gede dan desa Penglipuran.

Dari sini dapat dipahami kompleksitas dari budaya keruangan di Bali yang sangat berbeda dengan sistem budaya yang lainnya. Semua ini telah mendasari perwujudan sistem interaksi yang unik dan kompleks dalam kaitannya dengan budaya keruangan. Secara konsekuensi, sirkumstansi ini tidak memberi kesempatan untuk menggeneralisasi suatu kondisi dengan menyusun produk regulasi yang bersifat "satu untuk semua (*one for all*)".

(b) *Interaksi*, berbeda halnya dengan sembilan elemen budaya (PMS) lainnya yang merepresentasikan wujud komunikasi yang bersifat non-linguistik, Hall primary message system untuk interaksi secara khusus berbicara mengenai bahasa sebagai unsur utama dalam berkomunikasi: *to be able to interact with the environment is to be alive, and failure to do so is to be dead* (Hall 1973:55). Pernyataan ini tidak mengesampingkan arti penting dari elemen budaya lainnya, tetapi lebih pada penekanan kebudayaan sebagai bentuk komunikasi dengan bahasa sebagai komponen utamanya.

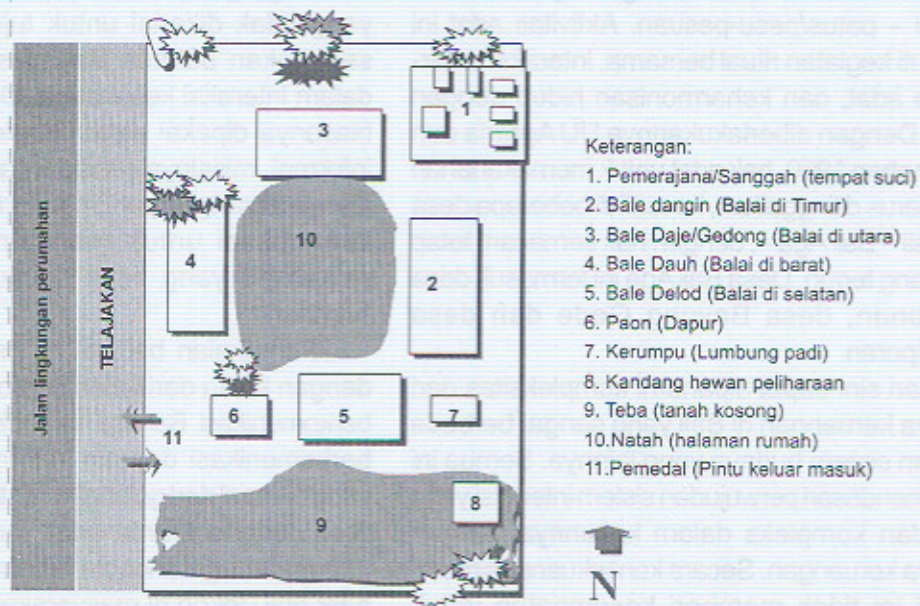
Bahasa dalam kebudayaan di Bali sangatlah kompleks yang diperkuat oleh intonasi dan gerakan tubuh. Seperti penjelasan awal yang telah diberikan, seiring dengan konsep hierarki, bahasa Bali dibagi dalam tiga tingkatan: utama, madya, dan nista – bahasa Bali halus, bahasa Bali madya, dan Bahasa Bali nista. Pemanfaatan masing-masing disesuaikan dengan konsep desa, kala, patra: di mana, kapan, dan dalam konteks yang mana bahasa ini dipergunakan. Bahasa halus biasanya dipergunakan dalam konteks formal, penuh perumpamaan, berbunga-bunga, dan mengandung penghormatan. Bahasa ini sering juga dipakai berkomunikasi untuk orang yang tidak dikenal untuk tujuan kesopanan, sedangkan bahasa Bali biasa dimanfaatkan dalam interaksi keseharian. Dan bahasa kasar biasanya dipakai dalam konteks yang sangat informal, misalnya sebagai bahasa keseharian jika seseorang marah, mengumpat ataupun berkomunikasi untuk menyampaikan kondisi psikologis yang tidak setuju dengan suatu keadaan.

Pemakaian bahasa di sini juga berkaitan dengan kasta dari kelompok orang yang diajak berkomunikasi. Bahasa halus dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang berasal dari golongan kasta yang lebih tinggi atau dengan krama adat yang juga memiliki jabatan sebagai anggota kepemimpinan lembaga adat atau tokoh di masyarakat. Jadi, dalam hal ini bahasa Bali mempresentasikan level kompleksitas tertentu yang merefleksikan interaksi sekaligus struktur dan hubungan sosial.

Dalam kaitannya dengan teritorialitas dan interaksi dalam kebudayaan Bali, ditemukan variasi yang luas dalam level yang berbeda: rumah tangga, desa, dan keseluruhan pulau. Secara umum, interaksi di sini berkaitan erat dengan konsep keseimbangan, Tri Hita Kharana. Interaksi yang paling menonjol terjadi karena adanya budaya ritual yang sangat berurat akar. Tanpa hari tanpa upacara. Kegiatan ini membutuhkan sumber daya material dan alamiah, termasuk melibatkan partisipasi krama adat dalam jumlah yang besar dalam persiapannya. Situasi ini menimbulkan masyarakat yang saling berketergantungan satu dengan yang lain yang mensyaratkan respons timbal balik, baik di tingkat rumah tangga, desa adat, atau keseluruhan pulau sehingga pola interdependansi ini memungkinkan untuk dijalankan. Kondisi ini lebih lanjut mewujudkan hubungan kemasyarakatan komunal yang secara luas menentukan praktik dan wujud budaya keruangan di Bali. Uraian ini dimulai dari penjelasan hubungan antara interaksi dan teritorialitas dari level rumah tangga.

Dengan digarisbawahi oleh prinsip-prinsip interaksi umum yang dijelaskan di atas, ada dua

teritori utama yang ditemukan dalam rumah tradisional: halaman rumah – natah – yang menjadi pusat orientasi, dan ruang kosong di depan pintu masuk/keluar rumah – telajakan. Gambar 2 menunjukkan posisi dari masing-masing ruang yang dimaksud dalam struktur tipikal rumah tradisional di Bali daratan. Natah memiliki multi peran. Selain sebagai pusat interaksi antar-anggota keluarga terjadi, natah juga dimanfaatkan sebagai ruang diselenggarakannya berbagai upacara ritual keluarga. Sementara itu, keberadaan telajakan memiliki kemiripan fungsi, tetapi lebih menitikberatkan pada kegunaannya saat keluarga bersangkutan memiliki upacara yang melibatkan partisipasi krama adat lainnya – biasanya dalam jumlah besar – sehingga tidak semua orang maupun aktivitas dapat ditampung di dalam rumah. Telajakan ini sangat terasa kepentingannya pada waktu pelaksanaan upacara pembakaran mayat – ngaben –, sebagai tempat untuk mempersiapkan beberapa perlengkapan upacara (yang tidak dapat dipersiapkan di dalam rumah), sebelum siap diarak ke kuburan.



Gambar 2 Diagram Tipikal Rumah Tradisional di Bali Daratan



Dalam level desa adat ruang-ruang strategis yang menampung interaksi di masyarakat dapat diklasifikasikan dalam dua grup, yaitu ruang umum yang mengakomodasi interaksi berfungsi ritual, dan ruang umum yang memampung interaksi sosial kemasyarakatan. Klasifikasi pertama meliputi keberadaan tempat pertemuan – wantilan – di pura, natar (natah) pura, ruang di luar – jaba – pura, sedangkan dalam klasifikasi kedua mencakup tempat bertemunya anggota banjar – balai banjar –; tempat bertemunya anggota krama adat dan lembaga adat – wantilan desa –; ruang terbuka umum untuk kegiatan olah raga, hiburan, maupun aktivitas informal lainnya – alun-alun –, yang biasanya terletak di pusat permukiman. Keberadaan ruang-ruang berfungsi ritual juga diperlukan dalam skala yang lebih besar, bagi pura-pura yang aktivitasnya tidak hanya dipartisipasikan oleh anggota masyarakat di tempat pura tersebut berada, tetapi oleh seluruh umat baik yang di dalam maupun di luar pulau Bali.

(c) *Organisasi*, yang dimaksudkan di sini adalah wujud kebudayaan yang terjadi karena adanya komunikasi antaranggota masyarakat yang dipengaruhi oleh fungsi masing-masing dalam kehidupan yang melibatkan satu grup atau beberapa grup orang, misalnya: masyarakat, kelas sosial di masyarakat, kasta, dan bahkan sebuah negara. Semua ini biasanya terjadi dalam suatu institusi yang terorganisasi. Praktik-praktik keorganisasian/asosiasi dalam kebudayaan di Bali dapat diidentifikasi ke dalam 3 kategori utama. Pertama, asosiasi yang berdasarkan teritori, seperti misalnya institusi desa adat, dan institusi banjar. Asosiasi ini akan memunculkan ruang-ruang aktivitas yang biasanya ditampung dalam balai desa, wantilan, dan banjar adat.

Kedua, asosiasi yang berdasarkan grup-grup sosial: sistem kasta dan klan – soroh – yang keduanya didasari oleh garis kelahiran dan keluarga. Interaksi dari kelompok ini biasanya berkaitan dengan keberadaan pura-pura keluarga. Keberlangsungan pura-pura ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing grup/klan. Berbeda dengan praktik kasta dalam ajaran Hindu, kasta di Bali tidak menginterpretasikan keterlarangan hubungan antara kasta satu

dengan yang lainnya (sudra, brahmana, satrya, maupun weisya). Kasta di Bali tidak didasari peran seseorang – dharma – di dalam hidup, tetapi diturunkan dari kelahiran. Orang yang terlahir dari keluarga brahmana akan secara langsung berkasta brahmana. Paktek ini memiliki kemiripan dengan klan.

Ketiga, asosiasi yang pembentukannya dimotivasi oleh profesi, kesamaan minat, status, dan pandangan. Asosiasi semacam biasanya disebut *sekeha*, yang keberadaannya dan keanggotaannya sering kali bersifat temporal. Ruang-ruang aktivitas untuk berbagai *sekeha* di masyarakat sering kali memanfaatkan ruang-ruang umum yang ada di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat keorganisasiannya yang tidak permanen. Eksistensi *sekeha* juga sering kali dikaitkan dengan minat yang sedang berkembang di masyarakat. Atau pada kesempatan lain kepentingan pembentukan *sekeha* juga didasari adanya tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan yang membutuhkan keorganisasian baru. Subak – organisasi irigasi juga termasuk ke dalam kelompok *sekeha*.

(d) *Ekonomi*, dalam *primary message system subsistence*, Hall mengartikan bentuk budaya sebagai wujud komunikasi yang terjadi dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan makanan, serta peningkatan level ekonomi. Spasial dimensi dari sistem *subsistence* dalam masyarakat di Bali didominasi oleh aktivitas bercocok tanam lahan kering maupun basah. Pertanian lahan basah terhampar dari pusat dataran Bali ke arah selatan, sementara usaha pertanian lahan kering bergerak dari pusat daerah pegunungan, dataran tinggi ke utara. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hamparan lahan pertanian padi dan vegetasi lainnya yang menghiasi sebagian besar lanskap dari pulau ini. Sementara itu, kehidupan masyarakat di daerah perairan, menggantungkan sumber kehidupan dan ekonominya dari mencari ikan – nelayan.

Proses semacam menimbulkan ruang-ruang tertentu yang akhirnya memberikan karakter dalam kehidupan berbudaya di Bali. Masing-

masing sumber mata pencaharian memunculkan ruang-ruang khusus yang menjadi tanggung jawab dan dilindungi oleh masing-masing grup mata pencaharian. Dominansi dari pola ini adalah munculnya pura-pura yang merefleksikan kepentingan dan peran dari masing-masing grup. Misalnya, Pura Melanting untuk mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang; Pura Dugul untuk krama adat yang bergelut di bidang bercocok tanam padi; dan Pura Segara untuk para nelayan. Masing-masing pura memiliki ruang-ruang ekstra yang masing-masing kelompok berkomunikasi dan berinteraksi.

(e) *Gender*, dalam PMS ini Hall memasukan wujud komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan dua kelompok jenis kelamin – lelaki dan perempuan – di masyarakat. Seperti halnya pola kehidupan di masyarakat di kebanyakan negara di dataran Asia, Bali menganut pola patrilineal, yaitu posisi kaum lelaki memiliki dominasi di atas kaum perempuan. Dalam kehidupan adat, sebuah keluarga diwakili oleh si bapak sebagai kepala keluarga. Pengukuran skala rumah dalam pekarangan rumah tangga juga didasari pada ukuran si bapak, sekali lagi sebagai aktor utama keluarga. Setelah menikah, seorang wanita juga mengikuti kasta dari si suami. Kasta si anak juga akan mengikuti kasta si bapak.

Pada kondisi tertentu yang dianggap tidak suci – sebel – , wanita tidak memiliki kesempatan untuk memasuki ruang-ruang yang disucikan, seperti misalnya area pura atau tempat-tempat persembahyangan lainnya, area permandian umum tertentu, atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dianggap suci. Larangan ini diberlakukan secara khusus bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi atau baru saja melahirkan. Bahkan, dalam kasus tertentu, seorang wanita yang baru melahirkan hanya diizinkan menginjakkan kaki di dapur dan sumur keluarga setelah 42 hari terhitung dari hari kelahiran. Sementara, tidak ada kondisi yang sejajar yang memposisikan kaum pria pada kondisi yang sama.

Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang melarang baik wanita maupun lelaki untuk memasuki area-area yang disucikan. Seperti misalnya adanya kematian di dalam keluarga.

Kemudian, sepasang penganten baru tidak diizinkan untuk memasuki area tempat suci sebelum upacara pernikahan secara adat dilaksanakan. Selain contoh-contoh di atas, secara prinsip umum, tidak ada perbedaan perlakuan spasial terhadap lelaki maupun perempuan berkaitan dengan akses ke ruang-ruang keluarga maupun umum yang ada di masyarakat. Namun, studi ini mengakui bahwa isu gender akan mempengaruhi konsep mendasar ruang.

(f) *Waktu*, dalam elemen budaya ini dibicarakan beragam wujud ruang yang dikaitkan dengan interaksi yang berhubungan dengan urutan, patrun, putaran waktu, dan ritme. Kompleksitas interaksi ini dalam kebudayaan di Bali dituangkan dalam kalender Bali "Tika" yang merupakan tuntunan urutan dari beragam interaksi sosial dan ritual, termasuk aktivitas keseharian dari masyarakat kebanyakan. Sekali lagi, ditekankan kembali bahwa ini bukan hanya merupakan ukuran waktu, tetapi juga menunjukkan makna budaya dari setiap satuan waktu yang menentukan dalam putaran kehidupan manusia di Bali. Kalender ini didasari oleh dua sistem perhitungan waktu secara bersamaan: solar – lunar system, dan pawuku-an.

Sistem Hindu Solar dan Lunar memiliki kemiripan dengan *Gregorian calendar* yang dipakai secara luas saat ini dengan durasi setahun sama dengan 12 bulan, sedangkan perhitungan berdasarkan pawukuan didasari pada satu wuku yang panjangnya sama dengan satu minggu. Dalam setahun terdapat 30 minggu. Kedua sistem inilah yang dipakai secara mendasar sebagai aturan penghitungan waktu. Selain hitungan waktu ini, orang Bali juga mengenal tahun Caka yang berasal dari suku Scythian di bagian selatan India. Tahun ini diawali pada hari pertama dari bulan ke sepuluh – kedasa – dari sistem Hindu Solar dan Lunar kalender, dan berawal 78 tahun di belakang tahun Gregorian.

Sistem pengaturan waktu yang kompleks ini mempengaruhi bagaimana ruang, baik yang berada pada level keluarga maupun yang menampung aktivitas kemasyarakatan, dimanfaatkan. Kalender ini berperan sebagai *time schedule*

bagaimana ruang diregulasi pemanfaatannya; daya tampungnya dikaji; kondisi fisiknya dipelihara; dan keberlangsungannya dijaga. Ruang yang menjadi fokus pengaturan dalam kalender ini biasanya yang berkaitan dengan ruang berfungsi umum, seperti misalnya pura-pura besar yang mengundang keterlibatan seluruh atau sebagian besar krama adat di seluruh Bali.

(g) *Instruksi*, dalam *primary message system* ini, Hall berbicara mengenai wujud komunikasi yang terjadi karena terjadinya interaksi yang bertujuan membagi dan mentransfer informasi, instruksi, dan pengetahuan. Dalam kehidupan di masyarakat, proses ini lebih dikenal dengan proses pembelajaran, bagaimana pengetahuan dibagi dan dipelajari melalui proses pembelajaran, baik formal maupun informal. Hall memandang tahapan ini sebagai proses adaptif yang diperluas dalam kerangka waktu dan ruang melalui alat komunikasi: bahasa. Proses ini juga merefleksikan interaksi bagaimana seseorang belajar mengenai kebudayaan, sebagaimana kebudayaan sendiri merupakan tingkah laku yang dipelajari dan ditanamkan. Melalui proses pembelajaran, seseorang akan mengenal bagaimana pola komunikasi dari kelompok masyarakat tertentu.

Pembelajaran merupakan agen di masyarakat, yang dalam konteks keberlangsungan kehidupan berbudaya di Bali, seringkali terjadi melalui proses informal melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan yang mengambil tempat di berbagai ruang berfungsi umum: wantilan, pura, alun-alun. Penelitian ini mengakui jika budaya tulis dan membaca bukan menjadi pola tingkah laku dari kebanyakan orang Bali secara tradisional. Proses pembelajaran seringkali dilaksanakan melalui proses lisan – mulut ke mulut – dari kelompok yang menguasai pengetahuan kepada kelompok yang membutuhkannya. Jadi, tempat-tempat kedua kelompok ini bertemu menjadi ruang strategis yang harus ada dan dijaga keberlangsungannya.

Karena sistem kemasyarakatan yang komunal, hubungan sosial yang dekat dan kooperatif, pembelajaran sangat dominan terjadi pada waktu masyarakat bertemu satu sama lain, pada event-event komunal, seperti rapat adat,

upacara ritual di pura, gotong royong, atau aktivitas komuniti lainnya. Jadi, ruang-ruang umum kemasyarakatan perannya menjadi sangat strategis dalam suatu sistem kebudayaan, khususnya di Bali.

(h) *Rekreasi*, dalam mengkaji *primary message system play* melingkupi komunikasi akibat interaksi yang terjadi untuk tujuan, rekreasi, kesenangan, permainan, dan termasuk pertandingan, atau bahkan perjudian. Seperti halnya dengan budaya pembelajaran, elemen ini utamanya terjadi di ruang-ruang yang menampung aktivitas kemasyarakatan. Interaksi-interaksi terkait biasanya dilakukan sebagai bagian dari interaksi pada sistem kemasyarakatan komunal dengan kehidupan ritual yang sangat kental. Permainan dapat dilaksanakan dalam level keluarga di ruang natah dan di luar rumah di tempat-tempat umum, seperti misalnya wantilan, alun-alun, balai desa, balai banjar, dan natar pura. Perjalanan menuju ke pura-pura selain merupakan perjalanan ritual juga berperan rekreasional. Pemandangan alam yang dilalui, percakapan yang terjadi, humor yang diceritakan merupakan bagian dari proses untuk menyenangkan diri secara fisik maupun psikologis. Jadi, keberadaan ruang-ruang umum dan pemandangan scenik alamiah merupakan bagian spasial dari aktivitas budaya, khususnya yang berkaitan dengan elemen permainan dan rekreasi.

(i) *Pembelaan diri*, dalam menjelaskan PMS *defense*, Hall melibatkan interaksi umat manusia dan metode-metode yang mereka manfaatkan untuk melindungi dirinya, tidak hanya dari ancaman alamiah tetapi juga dari masyarakat dan kekuatan-kekuatan yang dianggap merusak yang ada di masyarakat. Ada beragam wujud interaksi dalam sistem kebudayaan dan tradisi di Bali yang berfungsi sejenis. Kepercayaan terhadap Hinduisme-Bali dan beragam wujud praktiknya merupakan sebuah usaha untuk melindungi kehidupan masyarakat dari hal-hal yang membahayakan yang disebabkan oleh alam maupun oleh insting dasar yang dianggap merusak yang melekat pada diri manusia.

Sistem adat dan lembaga adatnya merupakan wujud institusi kemasyarakatan yang

Table 1 Ringkasan Praktik dan Wujud Budaya Keruangan di Bali

KEBUDAYAAN BALI

KEBUDAYAAN BALI

Hall's primary message system (PMS)	Paraktek kebudayaan Berkaitan dengan PMS territoriality	Bentuk/wujud budaya Berkaitan dengan PMS territoriality
Interaksi - Interaction	1. Interaksi dalam keluarga. 2. Interaksi antar krama adat.	1. Ruang keluarga: natah, telajakan. 2. Ruang komunal: alun-alun, pasar, wantilan desa, balai banjar, balai desa, natar pura, jaba pura, dan daerah pantai.
Organisasi - Ascociation	1. Pengaturan hal-hal terkait krama adat, grup dari golongan berbeda: kasta, klan/soroh, and kelompok profesi.	1. Ruang komunal: balai banjar, balai desa, wantilan desa.
Ekonomi - Subsistence	1. Praktik-praktik terkait usaha pertanian. 2. Paraktek-praktik terkait profesi nelayan. 3. Praktik-praktik terkait perdagangan.	1. Lahan pertanian, laut, pasar. 2. Pura Dugul, pura Segaa, Pura Melanting, alun-alun.
Gender - Bisexuality	Konsep ruang suci yang tidak boleh dimasuki oleh grup yang dianggap sedang dalam kondisi sebel (berhalangan), yaitu bagi wanita yang sedang haid, keluarga yang sedang berkabung, dan pasangan yang baru menikah.	1. Permandian untuk wanita. 2. Permandian untuk lelaki. 3. Permandian untuk ibu baru melahirkan. 4. Ruang-ruang suci dan sakral
Waktu - Temporality	Pengaturan ruang yang ditentukan oleh tika tika, yang bukan saja merupakan ukuran waktu, tetapi juga menunjukkan arti budaya dari waktu dalam setiap putaran kehidupan di Bali.	Ruang-ruang yang diatur sesuai keteraturan putaran waktu: odalan di pura, merajan, upacara di pantai, dan lain-lain
Instruksi - Learning	Metode pembelajaran informal yang terjadi bersamaan dengan beragam aktivitas kemasyarakatan	Tempat belajar: 1. Rumah tangga. 2. Ruang komunal: wantilan, balai banjar. 3. Pura, balai desa.
Rekreasi - Play	Permainan untuk tujuan: 1. Ritual. 2. Sosial. 3. Kesenangan.	Ruang ruang berfungsi rekreasi: 1. Jaba pura, natar pura. 2. Wantilan desa, balai banjar, alun-alun. 3. Natah, alun-alun, balai banjar, balai desa. 4. Daerah pantai dan pemandangan alam.
Pembelaan diri - Defense	Praktik-praktik pembelaan diri: 1. Praktik ritual. 2. Adat dan institusinya. 3. Praktik pengobatan tradisional. 4. Arsitektur Bali.	Ruang-ruang berfungsi defense: 1. Pura dan lingkungan sekitarnya, laut. 2. Balai desa/banjar, wantilan, alun-alun. 3. Rumah tinggal, bangunan umum.
Eksplotasi - Exploitation	Pertanian, pemanfaatan bahan bangunan local, penataan bangunan dan site.	1. Lahan pertanian 2. Penataan ruang dengan pola natah.

melindungi krama adat dari berbagai kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap bermacam norma maupun kode etik yang diyakini atau disepakati sebagai kebenaran di masyarakat (Geertz 1991, Suartika 2006a, 2006b, 2007). Tata cara pengobatan tradisional dengan memanfaatkan elemen-elemen alamiah yang ada di sekitarnya, merupakan wujud proteksi dari penyakit yang membahayakan eksistensi manusia. Perwujudan arsitektur Bali, juga merupakan wujud proteksi dari kondisi-kondisi ekstrem yang tidak diinginkan,

seperti misalnya panas, dingin, hujan, petir, banjir, kejahatan, atau bentuk-bentuk ketidaknyamanan lainnya. Secara mendasar, teritorial komponen yang mengizinkan praktik-praktik berkaitan dengan elemen pembelaan diri dan perlindungan diri ini sebagian bertepatan dengan ruang-ruang yang mewadahi praktik-praktik ritual (pura) yang tersebar di seluruh pelosok pulau, ruang umum yang dimanfaatkan

(k) *Eksplotasi*, istilah *exploitation* mengandung pengertian interaksi manusia dengan

lingkungan alamiah untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui proses yang adaptif. Aktivitas bercocok tanam padi tadah hujan yang berkembang dengan baik di Bali, tidak terlepas dari usaha untuk memanfaatkan potensi lahan yang subur yang disediakan oleh alam. Curahan lahar dari deretan gunung merapi di Bali dan curah hujan yang tinggi telah memberi manfaat besar terhadap tingkat kesuburan lahan pertanian. Kondisi inilah yang dimanfaatkan dengan mengembangkan sistem bercocok tanam yang relevan. Pemanfaatan bahan-bahan bangunan yang tersedia di lingkungan sekitar terdekat, seperti misalnya, bambu, atap ilalang, dan kayu, juga merupakan contoh lain dari wujud interaksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Perwujudan pola natak dalam pengaturan bangunan dan perencanaan site merupakan contoh berikutnya yang di satu sisi merupakan usaha mengantisipasi pengaruh lingkungan dengan kelembaban dan suhu yang relatif tinggi, keadaan yang harus dihadapi hampir merata di sepanjang tahun, sedangkan di sisi lain, penataan ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari sirkulasi udara yang cukup kencang yang mengalir dari arah selatan perairan Bali.

Sebagai rangkuman penjelasan tentang kebudayaan Bali, Tabel 1 merangkum kebudayaan keruangan di Bali yang disesuaikan dengan konsep sepuluh *primary message system* yang diperkenalkan oleh E. T. Hall. Table ini memfokuskan ringkasannya pada hubungan antara beragam praktik dan bentuk kebudayaan dari setiap *primary message system* dengan *territoriality* – keruangan. Tabel ini merangkum paktek-praktik keruangan dalam system kebudayaan di Bali. Dari Tabel 1 ini juga dapat diketahui jika pemanfaatan wujud-wujud keruangan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, wujud ruang-ruang yang muncul sebagai akibat interaksi terkait PMS *protective-defense* juga dimanfaatkan sebagai ruang diperlukan untuk PMS *instructional-learning*, atau sebaliknya. Salah satu alasan multifungsi ini adalah sebagai akibat dari orientasi

kemasyarakatan komunal yang secara dominan berkembang di Bali. Beberapa fungsi akomodasi dalam satu ruang sehingga keberadaan kontekstual lingkungan sekitar tempat sebuah sistem budaya berakar dan berkembang, sangatlah krusial dalam pengidentifikasian ini. Di samping kompleksitas dari Hall's Matrix kebudayaan yang diterapkan di sini, penerapannya masih diwarnai usaha untuk mensimplifikasikan kemungkinan tumpang tindih yang terjadi di antara beragam aspek penyusun kebudayaan lokal tertentu.

## SIMPULAN

Dengan mengimplementasikan metode pembahasan Matrik Kebudayaan dari E.T. Hall, artikel ini telah menganalisis praktik serta wujud "budaya keruangan" dalam kaitannya dengan elemen-elemen budaya lainnya yang ada di Bali. Seiring dengan tujuan pelaksanaan studi serta dokumentasinya, hasil studi ini diharapkan akan menjadi panduan dalam penentuan ruang-ruang yang secara ideal harus diproteksi. Hal ini akan menjadi acuan di dalam penentuan kebijakan ketata-ruangan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai aparaturnegara/daerah maupun oleh pihak-pihak lain yang berkompeten, dan dilimpahkan kekuasaan untuk melaksanakan peran ini. Pembangunan acuan ini memiliki peran strategis, khususnya untuk aktivitas pembangunan di Bali jika ide pelestarian budaya akan dilanjutkan penerapannya dalam perkembangan Pulau Dewata ke depan.

Artikel ini tidak hanya telah menganalisis praktik serta wujud ruang-ruang berfungsi budaya, tetapi juga secara implisit mendemonstrasikan level keterkaitan antarelemen budaya. Ini, salah satunya, dapat disimak dari eksistensi ruang-ruang yang sama yang dimanfaatkan untuk mewadahi interaksi dari elemen-elemen budaya yang berbeda. Sebagai pemikiran untuk sebuah studi lanjutan, sirkumstansi ini berpotensi diangkat sebagai salah satu variabel atau faktor determinan dalam menganalisis: seberapa pentingkah peran sebuah ruang dalam melestarikan praktik serta tata nilai budaya tertentu. Jika ide ini

direfleksikan ke dalam konteks budaya Bali, penentuan level pentingnya sebuah ruang tentunya harus dianalisis dalam *framework* konsepsi budaya Bali itu sendiri. Kerangka konsep ini secara fundamental melingkup pertimbangan konsepsi keseimbangan dari Tri Hita Kharana; konsepsi hierarki dari Tri Angga, dan konsepsi pengelompokan spasial secara makrokosmos (alam) dan mikrokosmos (individu).

Lebih lanjut, dengan mengambil konteks pembangunan keruangan di Bali, ulasan dalam artikel ini telah menggambarkan kompleksitas sebuah budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pelestariannya. Jika ide konservasi budaya diimplikasikan sebagai aktivitas yang "melindungi budaya dari perubahan", tantangan ini memang tidak terelakkan. Secara alamiah budaya itu adalah satuan yang berkembang dan tumbuh, seiring dengan tingkat peradaban yang dialami masyarakat pengusungnya. Usaha untuk mencegah perubahan ini akan mengandung pengertian pergerakan yang melawan arus alamiah. Selain kondisi alamiah budaya ini, konteks aktivitas pelestarian sebuah budaya tidak dapat dilepaskan dari beragam sirkumstansi esensial yang berpengaruh, yang melingkup: karakter pembangunan yang melandasi pembangunan sebuah satuan daerah perencanaan; esensi pembangunan itu sendiri sebagai koleksi aktivitas yang bergerak menuju gol modernitas dan pertumbuhan ekonomi; dan jika satuan daerah perencanaan yang dibahas diletakkan pada skala lokal, akan ada tantangan yang diakibatkan arus masuknya budaya di level global maupun nasional. Jadi, menjaga keberlangsungan sebuah budaya bukan tugas yang mudah, membutuhkan sebuah *framework* yang mensinergikan beragam faktor pengaruh, termasuk dari aspek pengaturan dan pengendalian tata ruang di daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Geertz, C. (Ed.). 1991. *State and Society in Bali: Historical, Textual and Anthropological Approaches*. Leiden: KITLV Press
- Hall, E T .1973. *The Silent Language Garden City*, New York: Anchor Press/Doubleday.
- Suartika, G.A.M. 2005. "Vanishing Paradise: Planning and Conflict in Bali". A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Philosophy, Sydney (Australia): University of New South Wales.
- . 2006a. "Examining the Impacts of National Social and Political Strategies on Culture and Territoriality Across the Nusantara: the Case Study of Bali". *Proceedings for the 2<sup>nd</sup> Asean PGS 2006, Asean Postgraduate Seminar in Built Environment*, 4 - 6 December 2006b, Kuala Lumpur (Malaysia): University Malaya, Faculty of The Built Environment.
- . 2006<sup>a</sup>. Examining the Impacts of National Social and Political Strategies on Culture and Territoriality Across the Nusantara: the Case Study of Bali". *Proceedings for the 2<sup>nd</sup> Asean PGS 2006, Asean Postgraduate Seminar in Built Environment*, 4 -6 December 2006, Kuala Lumpur (Malaysia): University Malaya, Faculty of The Built Environment.
- . 2006<sup>b</sup>. "Cultural Dimension of Space and State Urban Planning Practices: the Conflicting Interests in Land Development ". *Proceedings for the International Conference and Workshop of Urban Culture, Artepolis I* Department of Architecture, Planning and Policy Development, Institute of Technology Bandung, 21-23 July 2006.
- . 2007<sup>a</sup>. "Territoriality and the Market System – Adat Land vs. State Regulations on Land Matters in Bali" *Habitat International Journal*, 31 (2007): 167-176.
- . 2007<sup>b</sup>. "Perencanaan Keruangan, Wujud Komunikasi Kepentingan dalam Pembangunan (Spatial Planning: Forms of Communication in Development Processes" dalam *Journal Natah*, Vol 5, No. 2, Denpasar, Bali: Laboratorium Pemukiman, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana.
- . 2010. *Morphing Bali: The State, Planning, and Culture* Germany: Lambert Academic Publishing.